



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/173n0x46>

PENGARUH ALOKASI DANA PEMERINTAH DAN INVESTASI PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

Mei Sulfia Nurinda ^{a*}, Yurika Brilyan Astriana ^b

^a Magister Ilmu Ekonomi, FEB; meisulfia26@gmail.com, Universitas Negeri Malang; Jawa Timur

^b Magister Ilmu Ekonomi, FEB; yurikabrilyann@gmail.com, Universitas Negeri Malang; Jawa Timur

* Penulis Korespondensi: Mei Sulfia Nurinda

ABSTRACT

This study analyzes the impact of government fund allocation and public investment on boosting economic growth and reducing poverty in 38 regencies and cities in East Java Province from 2019 to 2023. Using a quantitative approach and panel regression techniques, the study evaluates the effects of Regional Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Specific Allocation Funds (DAK), and capital expenditure on the province's economic and social indicators. Our findings reveal that DAU and DAK significantly influence poverty reduction, with DAU positively affecting poverty but negatively impacting economic growth, while DAK shows a positive impact on both variables. Economic growth was found to significantly mediate the relationship between DAU and DAK and poverty. However, PAD and capital expenditure did not show significant effects on either poverty or economic growth. These findings underscore the importance of effective management of government funds and public investments in achieving sustainable poverty reduction and economic growth. The policy implications highlight the need for strategic allocation of funds and enhancing economic growth to effectively reduce poverty. Insights from East Java provide valuable lessons for other regions with similar socio-economic goals.

Keywords: Government Funds; Public Investment; Economic Growth; Poverty Reduction

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh alokasi dana pemerintah dan investasi publik terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2019–2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik regresi data panel, penelitian ini mengevaluasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal terhadap indikator ekonomi dan sosial di provinsi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, dengan DAU berpengaruh positif terhadap kemiskinan namun berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DAK menunjukkan pengaruh positif terhadap kedua variabel tersebut. Pertumbuhan ekonomi terbukti secara signifikan memediasi hubungan antara DAU dan DAK dengan kemiskinan. Namun demikian, PAD dan belanja modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan baik terhadap kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan dana pemerintah dan investasi publik secara efektif dalam mencapai pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menyoroti perlunya alokasi dana yang strategis serta peningkatan pertumbuhan ekonomi guna mengurangi kemiskinan secara efektif. Wawasan dari Jawa Timur ini memberikan pelajaran berharga bagi wilayah lain yang memiliki tujuan sosial-ekonomi serupa.

Kata Kunci: Dana Pemerintah; Investasi Publik; Pertumbuhan Ekonomi; Pengurangan Kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Ekonomi regional di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kemiskinan. Jawa Timur, sebagai provinsi besar dan padat, mencerminkan dinamika ini dengan jelas. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar dan posisi strategis dalam perekonomian nasional, provinsi Jawa Timur masih menghadapi masalah signifikan, terutama dalam distribusi hasil pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar kabupaten/kota adalah salah satu isu utama [1]. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan pada 2023, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 14,98%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 7,32% di perkotaan. Perbedaan ini menyoroti ketidakadilan sosial dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan, karena daerah pedesaan sering kekurangan akses terhadap layanan publik dasar.

Dengan kontribusi sekitar 14,85% terhadap PDB nasional pada 2022, Jawa Timur seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Namun, pengelolaan dana pemerintah dan investasi publik masih belum optimal. Laporan BPKP 2022 menunjukkan hanya sekitar 60% proyek yang didanai oleh PAD, DAU, dan DAK berhasil mencapai target, sering kali terhambat oleh birokrasi, kurangnya koordinasi, dan pengawasan yang lemah. Ini berdampak pada ketidakmerataan hasil pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang lambat.

Pengelolaan dana pemerintah di Jawa Timur, termasuk PAD, DAU, DAK, serta investasi publik dalam belanja modal, harus ditingkatkan. PAD harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal secara efektif [2], sementara DAU dan DAK dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan mendukung proyek pembangunan penting [3]. Investasi publik harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi [1].

Namun, ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan serta antar kabupaten/kota masih menjadi masalah utama. Dana sering kali tidak dikelola secara optimal, mengakibatkan proyek-proyek infrastruktur terlambat atau tidak sesuai kebutuhan Masyarakat [4]. Fokus yang berlebihan pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan dampak jangka panjang menyebabkan manfaat ekonomi tidak merata, dengan tingkat kemiskinan di banyak wilayah tetap tinggi [5].

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana alokasi dana pemerintah dan investasi publik berinteraksi dengan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi indikator ekonomi dan sosial di Jawa Timur. Dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, penelitian ini berusaha mengungkap apakah pertumbuhan ekonomi menjadi jalur (mekanisme) yang menghubungkan pengaruh alokasi dana dan investasi publik terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Melalui analisis data dari 38 kabupaten dan kota selama 2019-2023, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pembuat kebijakan, menawarkan wawasan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan untuk pembangunan yang lebih merata dan inklusif, serta memberikan pedoman untuk daerah lain menghadapi tantangan serupa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pertumbuhan Endogen: Pembangunan Ekonomi Regional dan Pengurangan Kemiskinan

Pembangunan ekonomi regional merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki disparitas regional yang signifikan [6]. Di Indonesia, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Teori-teori pembangunan regional menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal, intervensi pemerintah, dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah [5]. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya secara adil dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi ekonomi yang melimpah, provinsi ini seharusnya mampu memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Namun, Jawa Timur juga menghadapi tantangan besar dalam mencapai pembangunan yang

merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian oleh Safitri et al. [1] menyoroti bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang pesat di pusat-pusat perkotaan seperti Surabaya, daerah pedesaan di Jawa Timur masih mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi dan akses yang terbatas terhadap layanan dasar. Kesenjangan memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperburuk disparitas sosial-ekonomi, dan menegaskan pentingnya strategi yang lebih efektif dalam alokasi dana pemerintah dan investasi publik untuk mengurangi kesenjangan ini dan mendorong pertumbuhan yang inklusif [7].

Dalam menjawab tantangan ini, Teori Pertumbuhan Endogen menjadi kerangka teori yang relevan untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak hanya bergantung pada akumulasi modal fisik, tetapi juga pada akumulasi modal manusia, pengetahuan, dan inovasi yang didorong oleh kebijakan dan investasi pemerintah (Romer, 1986). Teori ini menunjukkan bagaimana investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi [8]. Di Jawa Timur, penerapan Teori Pertumbuhan Endogen membantu menjelaskan bagaimana alokasi dana pemerintah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta investasi publik dalam infrastruktur dan layanan sosial, dapat meningkatkan kapasitas daerah untuk berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Lebih lanjut, dalam konteks Jawa Timur, teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel intervening yang menyalurkan dampak dari alokasi dana dan investasi publik terhadap pengurangan kemiskinan. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dana pemerintah dan investasi publik dapat lebih efektif digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang tertinggal. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis dalam pengelolaan sumber daya publik, memaksimalkan dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi, dan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Jawa Timur.

Dengan menerapkan Teori Pertumbuhan Endogen, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dapat meningkatkan efektivitas alokasi dana pemerintah dan investasi publik, sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah provinsi. Fokus pada penguatan kapasitas lokal dan pengelolaan sumber daya yang efektif diharapkan tidak hanya akan mengurangi kemiskinan tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Jawa Timur untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, studi ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

Dalam kerangka Teori Pertumbuhan Endogen (Romer, 1986), pertumbuhan ekonomi bukan sekadar hasil akhir dari kebijakan fiskal, melainkan juga mekanisme antara (intervening) yang menyalurkan dampak alokasi dana pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi dalam modal manusia dan kapasitas produktif daerah, sebagaimana ditekankan Romer (1986), mendorong perluasan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai variabel intervening (mediasi) yang menjelaskan jalur (path) melalui mana alokasi dana pemerintah berdampak pada kemiskinan, konsisten dengan literatur pro-poor growth dan inclusive growth yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya efektif mengurangi kemiskinan apabila manfaatnya terdistribusi secara merata kepada masyarakat berpendapatan rendah.

2.2. Pengembangan Hipotesis

Pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi adalah dua tujuan utama pembangunan regional yang saling terkait. Di Indonesia, dengan disparitas regional yang signifikan, pemerintah pusat dan daerah mengandalkan beberapa instrumen fiskal utama untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif, khususnya di wilayah-wilayah seperti Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alat-alat kebijakan penting yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan. Selain itu, investasi publik dalam belanja modal juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendanaan utama yang berasal dari kegiatan ekonomi lokal dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah. PAD yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan menyediakan layanan publik yang lebih baik, masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung yang meningkatkan kualitas hidup dan, secara tidak langsung, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan [9], [10]. Hipotesis yang dikembangkan di sini adalah bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Timur (H1a) dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (H4a).

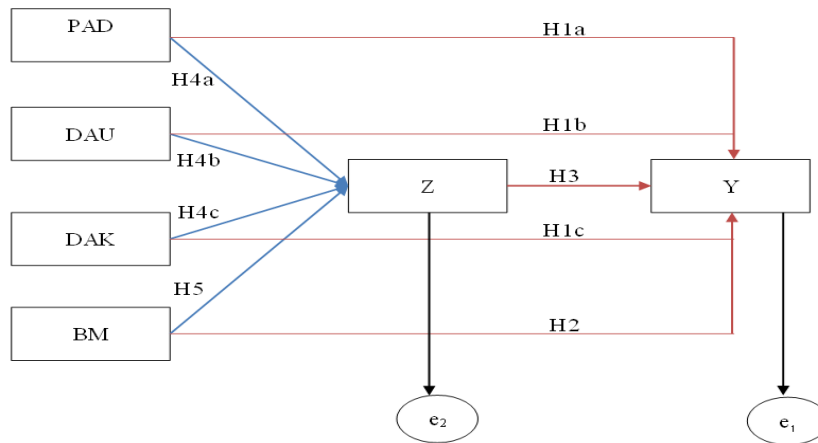
Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan mendukung pemerataan pembangunan. Alokasi DAU yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, yang pada gilirannya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur dan layanan kesehatan, yang merupakan elemen penting untuk mengurangi kemiskinan. Dalam konteks ini, hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Timur (H1b) dan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (H4b).

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendanai proyek-proyek spesifik seperti pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. DAK yang dikelola dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan dengan memperbaiki fasilitas dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dan layanan kesehatan yang didanai oleh DAK dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Timur (H1c) dan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (H4c).

Investasi publik dalam belanja modal, terutama dalam pembangunan infrastruktur, adalah komponen penting yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi [11]. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi regional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi [9], [12]. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa investasi publik dalam belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (H5).

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda dalam konteks ini. Tidak hanya sebagai hasil dari investasi publik dan alokasi dana yang tepat, tetapi juga sebagai variabel intervening yang menjadi jalur (mekanisme) penyalur dampak dari berbagai intervensi fiskal terhadap pengurangan kemiskinan. Ketika ekonomi tumbuh dengan baik, dampak positif dari PAD, DAU, dan DAK terhadap pengurangan kemiskinan akan disalurkan secara lebih efektif melalui jalur ini. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat memperkuat dampak tidak langsung dari alokasi dana pemerintah dan investasi publik [13], [14]. Hipotesis yang dikembangkan di sini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan antara PAD, DAU, dan DAK dengan pengurangan kemiskinan di Jawa Timur (H6a, H6b, H6c). Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memediasi hubungan antara investasi publik dalam belanja modal dan pengurangan kemiskinan (H7) [15].

Dengan memahami bagaimana alokasi dana pemerintah, investasi publik, dan pertumbuhan ekonomi saling berinteraksi, penelitian ini berupaya untuk memberikan panduan strategis bagi pengelolaan sumber daya publik yang lebih efektif di Jawa Timur. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dalam hubungan antara kebijakan fiskal dan hasil pembangunan sosial-ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan yang lebih efektif dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.



Gambar 1. Kerangka Hipotesis

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan analitik untuk mengevaluasi interaksi antara alokasi dana pemerintah dan investasi publik dengan pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Timur. Data sekunder yang digunakan mencakup laporan realisasi pendapatan daerah, laporan realisasi belanja pemerintah, dan laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 38 kabupaten dan kota selama periode 2019-2023, dengan total 190 observasi.

3.2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tiga jenis variabel: (1) Variabel independen, yaitu Alokasi Dana Pemerintah yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Investasi Publik yang diukur dengan Belanja Modal (BM); (2) Variabel dependen, yaitu Pengurangan Kemiskinan (Y); dan (3) Variabel intervening, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Z).

3.3. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hubungan langsung dan tidak langsung antara berbagai variabel dalam model yang diusulkan, serta memahami hubungan sebab akibat [16].

Analisis jalur dilakukan dengan menggunakan software Stata versi 17 dengan rangkaian analisis sebagai berikut:

- Analisis Regresi *Random Effect Model* (REM): Menggunakan regresi efek tetap atau efek acak untuk mengevaluasi hubungan antar variabel dalam model.
- Analisis Jalur: Mengestimasi koefisien jalur (β) untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel dalam model.
- Pengujian Hipotesis: Menguji hipotesis terkait hubungan antar variabel, termasuk pengujian koefisien jalur secara parsial untuk menilai signifikansi statistik serta pengujian Sobel untuk menilai signifikansi pengaruh mediasi.

Persamaan Jalur untuk Penelitian Ini:

- Persamaan I

$$Y_{1it} = a + \beta_{1it}PAD_{it} + \beta_{1it}DAU_{it} + \beta_{1it}DAK_{it} + \beta_{1it}BM_{it} + \beta_{1it}Z_{it}\beta_{1it} + \epsilon_{1it} \dots\dots (1)$$

Dalam persamaan ini, Y (kemiskinan) dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, BM, dan pertumbuhan ekonomi (Z). Koefisien β menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen, intervening, dan dependen.

b. Persamaan II

$$Z_{2it} = a + \beta_{2it}PAD_{it} + \beta_{2it}DAU_{it} + \beta_{2it}DAK_{it} + \beta_{2it}BM_{it} + \epsilon_{1it} \dots \dots \dots (2)$$

Dalam persamaan ini, Z (pertumbuhan ekonomi) dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, dan BM. Koefisien β menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dan dependen.

Koefisien jalur (β) pada kedua persamaan mengukur bagaimana perubahan pada variabel bebas dan intervening mempengaruhi variabel intervening (Z) dan variabel dependen (Y). Istilah kesalahan (e_1 dan e_2) menangkap faktor yang tidak dapat dijelaskan yang memengaruhi variabel-variabel tersebut. Analisis jalur bertujuan untuk memperkirakan koefisien ini dan menilai signifikansi hubungan antar variabel untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi REM dilakukan untuk membangun persamaan model dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh langsung antar variabel dalam merumuskan analisis jalur [17].

Tabel 1. Estimasi Parameter Regresi Linier Berganda Model Persamaan I

Y	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]
PAD	-0,102	0,652	-0,160	0,875	-1,381 1,177
DAU	7,430	0,333	22,290	0,000	6,777 8,084
DAK	2,029	0,346	5,860	0,000	1,350 2,707
BM	-0,221	0,487	-0,450	0,649	-1,176 0,733
Z	-0,072	0,020	-3,650	0,000	-0,111 -0,033
C	-71,092	.	.	.	.

Secara matematis, model regresi untuk persamaan I dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_{1it} = 71,092 - 0,102PAD_{it} + 7,430DAU_{it} + 2,029DAK_{it} - 0,221BM_{it} - 0,072Z_{it} + \epsilon_{1it} \dots \dots \dots (3)$$

Persamaan regresi ini memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan dalam variabel-variabel independen memengaruhi variabel dependen.

- Konstanta (71,092): Konstanta sebesar 71,092 menunjukkan nilai dari kemiskinan (Y) ketika semua variabel independen (PAD, DAU, DAK, BM, dan Z) bernilai nol.
- PAD (-0,102): Koefisien untuk PAD adalah -0,102, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam PAD akan menyebabkan penurunan sebesar 0,102 unit pada Kemiskinan (Y), dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
- DAU (7,430): Koefisien DAU sebesar 7,430 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam DAU akan meningkatkan Kemiskinan (Y) sebesar 7,430 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
- DAK (2,029): DAK memiliki koefisien sebesar 2,029, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam DAK akan meningkatkan Kemiskinan (Y) sebesar 2,029 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
- Belanja Modal (BM) (-0,221): Koefisien BM sebesar -0,221 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Belanja Modal akan mengurangi Kemiskinan (Y) sebesar 0,221 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
- Pertumbuhan Ekonomi (Z) (-0,072): Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,072 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Z akan menurunkan Kemiskinan (Y) sebesar 0,072 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

Selanjutnya, Tabel 2 berikut ini memperlihatkan hasil analisis regresi untuk model persamaan II.

Tabel 2. Estimasi Parameter Regresi Linier Berganda Persamaan II

Z	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]
PAD	1,584	1,145	1,380	0,167	-0,661 3,829
DAU	-7,889	1,932	-4,080	0,000	-11,676 -4,103

Z	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]
DAK	2,960	0,881	3,360	0,001	1,234 4,686
BM	1,937	1,288	1,500	0,132	-0,587 4,461
C	41,487	13,794	3,010	0,003	14,451 68,524

Secara matematis, model regresi untuk Persamaan II dapat ditulis sebagai berikut.

$$Z_{2it} = 41,487 + 1,584PAD_{it} - 7,889DAU_{it} + 2,960DAK_{it} + 1,937BM_{it} + \epsilon_{1it} \dots (5)$$

Dalam persamaan regresi ini, variabel Pertumbuhan ekonomi (Z) dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal (BM). Persamaan ini memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan pada variabel-variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen Pertumbuhan ekonomi (Z).

- Konstanta (41,487): Konstanta sebesar 41,487 menunjukkan nilai Pertumbuhan ekonomi (Z) ketika semua variabel independen (PAD, DAU, DAK, BM) bernilai nol.
- PAD (1,584): Koefisien PAD sebesar 1,584 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam PAD akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi (Z) sebesar 1,584 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
- DAU (-7,889): Koefisien DAU sebesar -7,889 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam DAU akan mengurangi Pertumbuhan ekonomi (Z) sebesar 7,889 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
- DAK (2,960): DAK memiliki koefisien sebesar 2,960, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam DAK akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi (Z) sebesar 2,960 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
- Belanja Modal (BM) (1,937): Koefisien BM sebesar 1,937 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Belanja Modal akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi (Z) sebesar 1,937 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

4.2. Analisis Path

Berdasarkan hasil model regresi REM pada tabel 1 dan tabel 2, didapatkan ringkasan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel PAD, DAU, DAK, BM terhadap Y melalui Z, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Koefisien Jalur (*Path*)

Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
PAD → Y	-0,102	-	-0,102
DAU → Y	7,430	-	7,430
DAK → Y	2,029	-	2,029
BM → Y	-0,221	-	-0,221
Z → Y	-0,072	-	-0,072
PAD → Z	1,584	-	1,584
DAU → Z	-7,890	-	-7,890
DAK → Z	2,960	-	2,960
BM → Z	1,937	-	1,937
PAD → Z → Y	-0,102	-0,072	-0,174
DAU → Z → Y	7,430	-0,072	7,358
DAK → Z → Y	2,029	-0,072	1,957
BM → Z → Y	-0,221	-0,072	-0,294

Tabel 3 menunjukkan koefisien jalur untuk variabel terhadap kemiskinan (Y) dan pertumbuhan ekonomi (Z). PAD berdampak negatif langsung terhadap kemiskinan (-0,102), sementara DAU dan DAK berdampak positif masing-masing 7,430 dan 2,029. Belanja Modal (BM) dan pertumbuhan ekonomi juga berdampak negatif terhadap kemiskinan, dengan koefisien -0,221 dan -0,072. PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (1,584), sedangkan DAU berpengaruh negatif signifikan (-7,890). DAK dan BM juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, masing-masing 2,960 dan 1,937. Variabel-variabel ini

menunjukkan dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dengan beberapa efek bertolak belakang pada kedua variabel dependen.

Tabel 3 juga mengungkapkan pengaruh total variabel PAD, DAU, DAK, dan BM terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. PAD memiliki pengaruh total negatif -0,174, DAU memberikan pengaruh total positif 7,358, DAK menunjukkan pengaruh total positif 1,957, dan BM berdampak negatif -0,294. Pengaruh tidak langsung ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi memediasi dampak alokasi dana pemerintah dan investasi publik terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

4.3. Uji Hipotesis

4.3.1. Uji Parsial

Uji parsial dilakukan untuk merumuskan hipotesis pengaruh antar dua variabel secara langsung. Syarat dikatakan berpengaruh signifikan apabila memiliki nilai $p\text{-value} < \alpha$ dari tingkat kepercayaan 95% (0,05).

Tabel 4. Uji Parsial Model Regresi Persamaan I

Variabel	t	p-value	Kesimpulan
PAD	-0,102	0.875	Negatif dan Tidak Signifikan
DAU	7,430	0.000	Positif dan Signifikan
DAK	2,029	0.000	Positif dan Signifikan
BM	-0,221	0.649	Negatif dan Tidak Signifikan
Z	-0,072	0.000	Negatif dan Signifikan

Variabel Dependen: Kemiskinan (Y)

Berdasarkan Tabel 4 dan syarat uji parsial, berikut adalah interpretasi pengaruh variabel terhadap kemiskinan (Y):

- H1a: Dengan koefisien -0,102 dan p-value 0,875, PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena p-value lebih besar dari 0,05, artinya menolak H1a.
- H1b: Koefisien 7,430 dan p-value 0,000 menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, karena p-value kurang dari 0,05, artinya menerima H1b.
- H1c: Dengan koefisien 2,029 dan p-value 0,000, DAK juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, karena p-value kurang dari 0,05, artinya menerima H1c.
- H2: Koefisien -0,221 dan p-value 0,649 menunjukkan bahwa BM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, karena p-value lebih besar dari 0,05, artinya menolak H2.
- H3: Koefisien -0,072 dan p-value 0,000, pertumbuhan ekonomi (Z) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, karena p-value kurang dari 0,05, artinya menolak H3.

Selanjutnya uji hipotesis untuk persamaan II dengan variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi (Z)

Tabel 5. Uji Parsial Model Regresi Persamaan II

Variabel	t	p-value	Kesimpulan
PAD	1,584	0.167	Positif dan Tidak Signifikan
DAU	-7,890	0.000	Negatif dan Signifikan
DAK	2,960	0.001	Positif dan Signifikan
BM	1,937	0.132	Positif dan Tidak Signifikan

Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (Z)

Tabel 5 menunjukkan hasil uji parsial untuk model regresi yang mengukur pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi (Z). Berikut adalah interpretasinya berdasarkan p-value dengan tingkat kepercayaan 95% (0,05):

- H4a: koefisien 1,584 dan p-value 0,167, PAD memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruhnya tidak signifikan karena p-value lebih besar dari 0,05, artinya menolak H4a.
- H4b: koefisien -7,890 dan p-value 0,000 menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena p-value kurang dari 0,05, artinya menolak H4b.
- H4c: koefisien 2,960 dan p-value 0,001 menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena p-value kurang dari 0,05, artinya menerima H4c.
- H5: koefisien 1,937 dan p-value 0,132, BM menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak signifikan karena p-value lebih besar dari 0,05, menolak H5.

4.3.2. Uji Sobel

Uji Sobel digunakan untuk menilai signifikansi efek mediasi dalam model analisis jalur, yaitu untuk menguji apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen melalui variabel mediator secara signifikan [18]. Uji ini menghitung nilai Z berdasarkan koefisien jalur dan standar error antara variabel independen ke mediator (a) dan dari mediator ke dependen (b). Rumus untuk menghitung nilai Z adalah:

$$Z = \frac{a \times b}{\sqrt{(b^2 \times SEa^2) + (a^2 \times SEb^2)}} \dots\dots\dots (6)$$

Tabel 6 menunjukkan hasil uji Sobel yang digunakan untuk menilai signifikansi efek mediasi dari variabel intervening (Z) dalam model analisis jalur. Uji Sobel mengevaluasi apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (Z) adalah signifikan. Nilai Z harus lebih besar dari 1,96 untuk dianggap signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 6. Uji Sobel

Pengaruh Mediasi	(a)	(b)	SEa	SEb	Z
PAD → Z → Y	1,584	-0,072	1,145	0,020	-1,293
DAU → Z → Y	-7,890	-0,072	1,932	0,020	2,722
DAK → Z → Y	2,960	-0,072	0,881	0,020	-2,473
BM → Z → Y	1,937	-0,072	1,288	0,020	-1,391

Berikut adalah interpretasinya:

- PAD → Z → Y: Dengan nilai Z sebesar -1,293, efek mediasi dari pertumbuhan ekonomi (Z) dalam hubungan antara PAD dan kemiskinan (Y) tidak signifikan, karena nilai Z lebih kecil dari 1,96, menolak hipotesis H6a.
- DAU → Z → Y: Nilai Z sebesar 2,722 menunjukkan bahwa efek mediasi dari pertumbuhan ekonomi (Z) dalam hubungan antara DAU dan kemiskinan (Y) adalah signifikan, karena nilai Z lebih besar dari 1,96. Ini berarti pertumbuhan ekonomi secara signifikan memediasi pengaruh DAU terhadap kemiskinan, menerima hipotesis H6b.
- DAK → Z → Y: Dengan nilai Z sebesar -2,473, efek mediasi dari pertumbuhan ekonomi (Z) dalam hubungan antara DAK dan kemiskinan (Y) juga signifikan. Meskipun Z negatif, yang menunjukkan arah mediasi yang mungkin berbeda, nilainya tetap lebih besar dari 1,96, menunjukkan signifikansi, menerima hipotesis H6c,
- BM → Z → Y: Nilai Z sebesar -1,391 menunjukkan bahwa efek mediasi dari pertumbuhan ekonomi (Z) dalam hubungan antara Belanja Modal (BM) dan kemiskinan (Y) tidak signifikan, karena nilai Z kurang dari 1,96, menolak hipotesis H7.

Secara keseluruhan, hanya DAU dan DAK yang memiliki efek mediasi signifikan melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, sedangkan PAD dan Belanja Modal tidak menunjukkan efek mediasi yang signifikan.

4.4. Pembahasan

4.1.1. Pengaruh Alokasi Dana Pemerintah, Investasi Publik dalam Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Optimasi alokasi dana pemerintah dan investasi publik merupakan strategi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan [8], terutama di provinsi dengan tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan seperti Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memainkan peran penting dalam upaya pengurangan kemiskinan, dengan DAU berkontribusi positif terhadap kemiskinan, meskipun juga memiliki dampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan DAU yang tidak optimal atau kurangnya fokus pada proyek yang memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, menurut Waryanto [11] strategi yang lebih terencana dan efisien dalam alokasi DAU dapat meningkatkan dampak positifnya pada pengurangan kemiskinan sambil mengurangi dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, DAK menunjukkan dampak yang lebih positif, baik terhadap pengurangan kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi. Penggunaan DAK yang diarahkan pada proyek-proyek spesifik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat

dan mendorong pertumbuhan ekonomi [11]. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan yang tepat dan eksekusi proyek yang berbasis data dan kebutuhan lokal untuk memaksimalkan manfaat DAK. Investasi yang strategis dan terencana dalam sektor-sektor kunci dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan [19], [20].

Belanja Modal (BM), meskipun diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dalam penelitian ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakefektifan implementasi proyek atau kurangnya fokus pada inisiatif yang berdampak langsung pada masyarakat miskin. Untuk meningkatkan efektivitas belanja modal, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan prioritas pembangunan daerah [19]–[21].

Pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan. Namun, dampak ini sangat tergantung pada sejauh mana pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu bagaimana pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan di kalangan masyarakat miskin. Untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih efektif, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif, dengan manfaat yang merata di seluruh lapisan Masyarakat [9], [20].

4.1.2. Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan Pengurangan Kemiskinan

Dalam konteks pengelolaan dana pemerintah dan investasi publik, peran mediasi pertumbuhan ekonomi memainkan peran krusial dalam menghubungkan alokasi dana seperti PAD, DAU, dan DAK dengan pengurangan kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek mediasi yang signifikan dalam hubungan antara alokasi dana dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Untuk alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), meskipun secara langsung ditemukan berkontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan, DAU memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa meskipun DAU meningkatkan pengeluaran untuk sektor sosial dan kesejahteraan, alokasi ini mungkin tidak cukup efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang moderat, dalam hal ini, dapat memperbesar atau mengurangi dampak DAU terhadap kemiskinan tergantung pada kualitas dan efisiensi pengelolaan dana [22]. Oleh karena itu, strategi untuk mengoptimalkan DAU harus mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas pengeluaran dan memastikan bahwa investasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan dampak positif yang lebih konsisten terhadap baik pertumbuhan ekonomi maupun pengurangan kemiskinan. DAK yang diarahkan pada proyek spesifik, seperti infrastruktur dan pendidikan, memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal [23]. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai mediator yang memperkuat efek positif dari DAK terhadap pengurangan kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang sehat memperbesar manfaat dari investasi DAK, menciptakan siklus positif yang mempercepat proses pengentasan kemiskinan.

Belanja Modal (BM), meskipun dirancang untuk meningkatkan infrastruktur publik, tidak menunjukkan efek signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dalam penelitian ini, sehingga menyetujui hasil penelitian Utami & Indrajaya [24]. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya fokus pada proyek-proyek yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi juga tidak memperlihatkan efek mediasi yang signifikan dalam hubungan ini, menunjukkan bahwa proyek BM mungkin tidak berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan pendapatan atau lapangan kerja di kalangan masyarakat miskin. Untuk mengatasi isu ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas implementasi proyek BM serta perbaikan dalam perencanaan untuk memastikan bahwa proyek ini berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan.

Secara keseluruhan, mediasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana alokasi dana pemerintah dapat mempengaruhi pengurangan kemiskinan secara tidak langsung melalui efek ekonomi yang lebih luas. Temuan ini menyoroti pentingnya strategi pengelolaan dana yang tidak hanya fokus pada distribusi dana, tetapi juga pada penciptaan lingkungan ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif. Dengan demikian, untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih efektif, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan

alokasi dana dengan upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

4.1.3. Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Hubungan antara Investasi Publik dan Pengurangan Kemiskinan

Mediasi pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara investasi publik dan pengurangan kemiskinan merupakan aspek penting dalam memahami efektivitas strategi pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran kunci dalam memperkuat atau mengurangi dampak investasi publik terhadap kemiskinan. Selaras dengan penelitian Noviana Putri & Sabar [25] dan Kaligis et al. [15] yang menyatakan bahwa belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi dapat mendukung secara signifikan pengentasan kemiskinan.

Investasi publik, termasuk belanja modal yang diarahkan pada infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, berpotensi besar dalam mengurangi kemiskinan [25]. Namun, dampak investasi publik ini sering kali dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai mediator yang dapat memperkuat efek positif investasi publik atau, sebaliknya, membatasi dampaknya jika pertumbuhan tidak inklusif atau tidak memadai.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan antara investasi publik dan pengurangan kemiskinan. Investasi publik yang dilakukan dalam periode pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung memberikan hasil yang lebih positif dalam hal pengurangan kemiskinan [25]. Ketika ekonomi tumbuh dengan baik, investasi publik dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki akses ke layanan dasar, yang semuanya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan [15]. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi stagnan atau melambat, dampak dari investasi publik terhadap pengurangan kemiskinan dapat menjadi kurang signifikan. Hal ini mungkin karena pertumbuhan ekonomi yang rendah menghambat penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mengurangi manfaat dari investasi publik.

Sebagai contoh, belanja modal pada sektor infrastruktur dan layanan publik yang meningkat selama periode pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat mempercepat pembangunan lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, meskipun investasi publik dilakukan, hasilnya mungkin tidak optimal karena keterbatasan daya serap ekonomi dan potensi pengembalian investasi yang rendah. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan investasi publik untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan merancang strategi yang dapat memaksimalkan manfaat dalam berbagai situasi ekonomi.

Untuk mengoptimalkan dampak investasi publik dalam mengurangi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang menyelaraskan strategi investasi dengan upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif [9]. Ini termasuk mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek investasi yang dapat memberikan manfaat langsung dan signifikan bagi masyarakat miskin serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan investasi publik yang efektif harus melibatkan perencanaan yang cermat dan responsif terhadap dinamika ekonomi untuk memastikan bahwa setiap dolar investasi memberikan hasil maksimal dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2023. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dan negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DAK menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap keduanya. Pertumbuhan ekonomi juga memediasi secara signifikan hubungan antara DAU dan DAK terhadap kemiskinan. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi tidak memediasi secara signifikan pengaruh keduanya terhadap kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi dana pemerintah, terutama DAU dan DAK, sangat berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan di wilayah Jawa Timur, dengan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai mediator kunci.

Implikasi

Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting bagi kebijakan pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Pertama, pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat memainkan peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Kebijakan yang memperkuat efektivitas DAU dan DAK dalam mendukung program-program pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi perlu diprioritaskan. Selain itu, temuan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sebagai mediator dalam hubungan antara DAU dan DAK terhadap kemiskinan mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat dampak positif dari alokasi dana terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu fokus pada strategi yang tidak hanya mengalokasikan dana secara tepat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan terbatas pada periode 2019-2023 dan hanya mencakup 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di periode waktu yang berbeda atau di wilayah lain di Indonesia. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel ekonomi utama, sementara faktor lain seperti investasi swasta, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia juga bisa berperan penting dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan temporal dan geografis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak alokasi dana pemerintah. Selain itu, penambahan variabel-variabel lain yang relevan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian mendalam mengenai mekanisme spesifik bagaimana DAU dan DAK memengaruhi kemiskinan melalui berbagai saluran ekonomi juga akan bermanfaat untuk memperbaiki kebijakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. I. D. Safitri, C. F. Ananda, and F. Prasetyia, "Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 85–96, 2021, doi: 10.33105/itrev.v6i2.339.
- [2] A. T. Sulisty, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 43–59, 2018, doi: 10.33105/itrev.v3i1.22.
- [3] T. A. Sembiring, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018)," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 5, no. 1, pp. 77–91, 2020, doi: 10.33105/itrev.v5i1.167.
- [4] T. A. Sigit and A. Kosasih, "Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 105–119, 2020, doi: 10.33105/itrev.v5i2.170.
- [5] H. Puspitasari, M. Khusaini, and F. W. Pangestuty, "Analisis Pendapatan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal Kawasan Gerbangkertosusila," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 171–187, 2023, doi: 10.33105/itrev.v8i2.487.
- [6] E. A. Meida and S. Susilo, "Pengaruh Pad, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022," *J. Dev. Econ. Soc. Stud.*, vol. 3, no. 2, pp. 483–501, 2024, doi: 10.21776/jdess.2024.03.2.12.
- [7] R. P. Putro, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 1, no. 2, pp. 85–100, 2016, doi: 10.33105/itrev.v1i2.53.
- [8] U. Masduki, W. Rindayati, and S. Mulatsih, "How can quality regional spending reduce poverty and improve human development index?," *J. Asian Econ.*, vol. 82, no. July, p. 101515, 2022, doi: 10.1016/j.asieco.2022.101515.
- [9] W. Ruch and H. S. Geyer, "Public capital investment, economic growth and poverty reduction in South African Municipalities," *Reg. Sci. Policy Pract.*, vol. 9, no. 4, pp. 269–284, 2017, doi: 10.1111/rsp3.12104.
- [10] D. Anitasari and N. Imaningsih, "Analysis Of The Effect Of Regional Original Income (PAD) And

- Economic Growth On The Human Development Index With Capital Expenditure As An Intervening Variable (Case Study In The Regional Government Of Nganjuk Regency,” *Manag. Stud. Entrep. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 122–128, 2024, doi: 10.37385/msej.v5i1.2209.
- [11] P. Waryanto, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *J. Pembendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 35–55, 2017.
- [12] M. Muliati and D. W. R. D. Handoyo, “Alokasi Anggaran Publik Dan Pengentasan Kemiskinan Di Pulau Kalimantan,” *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 4, no. 4, pp. 371–384, 2019, doi: 10.33105/itrev.v4i4.173.
- [13] S. R. Pasa, G. M. . Kawung, and I. P. F. Rorong, “Analisis Pengaruh PAD Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Ke Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kota Bitung,” *J. Pembang. Ekon. dan Keuang. Drh.*, vol. 24, no. 1, pp. 80–94, 2023.
- [14] N. W. Sukarmi and I. G. A. N. Budiasih, “Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana*, vol. 5, no. 3, pp. 545–572, 2016.
- [15] E. Kaligis, D. S. . Engka, and K. D. Tolosang, “Effect of Capital Expenditure on Poverty in North Minahasa Through Economic Growth As Intervening Variables,” *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 17, no. 2, pp. 94–105, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/17586>
- [16] J. Sarwono, “Mengenal Path Analysis (Sarwono),” *J. Ilm. Manaj. Bisnis*, vol. 11, pp. 285–296, 2011, [Online]. Available: <http://www.jonathansarwono.info>
- [17] I. Ghazali and D. Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonomi Teori, Aplikasi dan Konsep dengan views 10 Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.
- [18] S. Abu-Bader and T. V. Jones, “Statistical Mediation Analysis Using the Sobel Test and Hayes Spss Process Macro,” *Int. J. Quant. Qual. Res. Methods*, vol. 9, no. 1, pp. 42–61, 2021.
- [19] W. Agyemang-Duah *et al.*, “Reducing poverty through fiscal decentralization in Ghana and beyond: A review,” *Cogent Econ. Financ.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–14, 2018, doi: 10.1080/23322039.2018.1476035.
- [20] S. A. Khan, “Decentralization and poverty reduction: A theoretical framework for exploring the linkages,” *Int. Rev. Public Adm.*, vol. 18, no. 2, pp. 145–172, 2013, doi: 10.1080/12294659.2013.10805256.
- [21] S. Jung, S. H. Cho, and R. K. Roberts, “The impact of government funding of poverty reduction programmes,” *Pap. Reg. Sci.*, vol. 94, no. 3, pp. 653–675, 2015, doi: 10.1111/pirs.12089.
- [22] R. Amami and K. Asmara, “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi,” *J. Ekobistek*, vol. 11, no. 2, pp. 48–54, 2022, doi: 10.35134/ekobistek.v11i2.297.
- [23] A. F. Djollong, “The Influence of Development Expenditure , Investment , and Inflation on Economic Growth in Parepare City,” *Econ. J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 151–158, 2021, doi: 10.31850/economos.v4i2.908.
- [24] D. N. Utami and I. G. B. Indrajaya, “Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekon. Pembang. Univ. Udayana*, vol. 8, no. 10, pp. 2195–2225, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.harianregional.com/ceep/id-46827>
- [25] R. Noviana Putri and W. Sabar, “The Effect of Local Origin Income and Capital Expenditure on Economic Growth and Poverty in Jenepono Regency,” *Bull. Econ. Stud.*, vol. 3, no. 2, pp. 104–122, 2023, doi: 10.24252/best.v3i2.41410.

NOMENKLATUR

Nomenklatur berikut memuat simbol-simbol yang digunakan dalam Persamaan (1) sampai dengan (6) pada artikel ini beserta artinya.

Y = Tingkat kemiskinan (variabel dependen pada Persamaan I)

Z = Pertumbuhan ekonomi (variabel intervening pada Persamaan I; variabel dependen pada Persamaan II)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (variabel independen)

DAU = Dana Alokasi Umum (variabel independen)

DAK = Dana Alokasi Khusus (variabel independen)

BM = Belanja Modal (variabel independen)

β_0 (konstanta) = Nilai variabel dependen ketika seluruh variabel independen bernilai nol

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien jalur (regresi) yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan masing-masing variabel independen/intervening terhadap variabel dependen pada Persamaan I dan Persamaan II

e_1 = Error term (residual) pada Persamaan I

e_2 = Error term (residual) pada Persamaan II

a = Koefisien jalur dari variabel independen ke variabel mediator/intervening (Z) yang digunakan dalam uji Sobel (Persamaan 6)

b = Koefisien jalur dari variabel mediator/intervening (Z) ke variabel dependen (Y) yang digunakan dalam uji Sobel (Persamaan 6)

SE_a = Standard error dari koefisien a

SE_b = Standard error dari koefisien b

Z (pada Persamaan 6) = Nilai statistik hasil uji Sobel yang digunakan untuk menguji signifikansi efek mediasi; nilai Z dianggap signifikan pada taraf kepercayaan 95% apabila lebih besar dari 1,96.